

BAB 5

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis pembahasan tentang “Analisis Eksklusi Baru Terhadap Anak Berkebutuhan Khusus (Studi Kasus Pada Sekolah Inklusi Di Kabupaten Banyumas)” maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik sekolah inklusi yang membentuk adanya eksklusi baru pada ABK terjadi melalui berbagai kegiatan dan kebijakan yang ada di sekolah. Proses seleksi penerimaan siswa baru terutama bagi anak berkebutuhan khusus dengan persyaratan dan tahapan yang lebih panjang menunjukkan praktik pendidikan inklusi yang masih mensyaratkan penerimaan. Anak berkebutuhan khusus diwajibkan untuk menunjukkan surat dari psikolog dan rekomendasi sekolah inklusi. Proses seleksi penerimaan siswa baru menciptakan adanya kategorisasi ABK yang dapat diterima sekolah hal ini dapat menghambat ABK untuk mendapatkan hak pendidikan. Tahapan penerimaan siswa baru dengan kebijakan-kebijakan yang dilakukan sekolah menunjukkan adanya pengingkaran pengakuan yang ditunjukkan penerimaan pada ABK terbentuk karena adanya kebijakan akademik bukan atas menghargai. Praktik eksklusi baru ditemukan dalam pelaksanaan pembelajaran, terdapat dua model kelas dalam sekolah inklusi. Sekolah yang secara penuh mengintegrasikan siswa tanpa kebutuhan khusus dengan siswa berkebutuhan khusus dalam satu kelas inklusi. Sekolah dengan model pemisahan kelas antara kelas inklusi dan kelas intensif untuk ABK dengan keterbatasan yang lebih berat. Proses pembelajaran akan dibantu oleh guru pendamping khusus untuk mendampingi ABK. Perbandingan jumlah ABK dengan GPK yang tidak sebanding menyebabkan tidak semua ABK mendapatkan bimbingan yang maksimal. Hal ini menunjukkan adanya kegagalan pengakuan hak, bahwa setiap anak memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pendampingan. Praktik pemisahan kelas inklusi dan intensif adalah bentuk

kegagalan pengakuan cinta yang akan mempengaruhi cara siswa dalam berinteraksi. ABK akan cenderung berkelompok dengan ABK lainnya. Metode dan materi pelajaran yang tidak sesuai dengan kemampuan anak akan sulit untuk diterima. Hal ini karena belum adanya kurikulum inklusi yang jelas sehingga pembelajaran masih menggunakan kurikulum nasional yang saat ini kurikulum merdeka. Praktik pengajaran tidak cukup dengan hanya melihat kemampuan siswa tanpa kebutuhan khusus tetapi harus mempertimbangkan semua anak yang ada dalam kelas termasuk adanya ABK. Sikap guru pada ABK masih terdapat anggapan bahwa ABK tidak mampu untuk mengikuti pembelajaran dan stigma negatif yang dilabelkan pada ABK menunjukkan kurangnya pengakuan cinta dari lingkungan sekolah. Praktik ini terjadi karena kebijakan-kebijakan yang dilakukan sekolah inklusi. Proses pembelajaran dengan kurangnya fasilitas dan sumber daya profesional juga menjadi bentuk praktik sekolah inklusi dapat menciptakan eksklusi baru pada anak berkebutuhan khusus.

2. Bentuk eksklusi baru pada anak berkebutuhan khusus di sekolah inklusi terdiri dari eksklusi cinta (sosial), eksklusi hukum (struktural) dan eksklusi solidaritas (kultural). Bentuk-bentuk eksklusi baru pada anak berkebutuhan khusus terjadi karena kegagalan dalam pemberian pengakuan atau rekognisi. Eksklusi cinta (sosial) walaupun anak berkebutuhan khusus telah bergabung secara fisik dilingkungan sekolah bersama siswa reguler lainnya, mereka masih mengalami eksklusi yang mengakibatkan mereka memiliki keterbatasan dalam berinteraksi dengan yang lainnya karena penerimaan sosial yang kurang dari warga sekolah. Adanya siswa yang tidak memiliki teman akrab dan cenderung berteman dengan ABK lainnya menunjukkan kurangnya penerimaan sosial. Pengelompokan ABK dan ATBK dalam pembelajaran akan membentuk cara ABK dalam berinteraksi. Praktik tersebut secara tidak langsung menyebabkan hubungan sosial yang terjalin dalam lingkungan inklusi kurang terintegrasi dan menciptakan eksklusi yang tidak disadari. Eksklusi secara struktural terjadi karena kebijakan sekolah yang diberlakukan yaitu dalam proses seleksi penerimaan siswa baru, proses pembelajaran yang masih memisahkan antara ABK dan anak tanpa kebutuhan khusus serta kurikulum yang belum resmi mengenai kurikulum inklusi. Kurangnya fasilitas dan sumber daya profesional di lingkungan sekolah inklusi

menghambat proses pembelajaran. Eksklusi kultural terjadi dari sikap solidaritas dan kultur sekolah yang kurang mengapresiasi kemampuan akademik dan non akademik siswa ABK, mereka masih hanya sebagai objek pendidikan inklusi belum sepenuhnya terlibat sebagai subjek aktif dalam pendidikan inklusi. ABK dianggap sebagai individu yang perlu dibantu tanpa diberikan kesempatan untuk menunjukkan keahlian dan kemampuan secara penuh.

B. Rekomendasi

Eksklusi baru pada anak berkebutuhan khusus di sekolah inklusi menunjukkan bahwa praktik pendidikan inklusi masih memerlukan evaluasi dan perhatian khusus. Anak berkebutuhan khusus yang telah tergabung dalam sekolah inklusi seharusnya dapat menikmati hak-haknya secara penuh. Berdasarkan pada hasil temuan berikut rekomendasi yang dapat dipertimbangkan dalam pelaksanaan pendidikan inklusi di Kabupaten Banyumas:

1. Bagi Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas dapat memberikan perhatian lebih pada penyelenggara pendidikan inklusi dengan memberikan bantuan khusus untuk program inklusi seperti alat peraga pembelajaran untuk membantu guru dalam memberikan penjelasan pada siswa. Memberikan pelatihan pendidikan inklusi dan kemampuan pedagogik pada para guru di sekolah inklusi agar mereka memiliki kemampuan yang baik dalam memahami kebutuhan ABK. Merancang modifikasi kurikulum nasional yang sesuai dengan kebutuhan sekolah inklusi dan tepat dengan keadaan siswa yang ada di Kabupaten Banyumas, bekerja sama dengan berbagai pihak terkait seperti perguruan tinggi. Memberikan bantuan kelengkapan fasilitas pembelajaran di setiap sekolah yang telah memberikan layanan inklusi. Memberikan panduan dan pedoman penyelenggaraan pendidikan inklusi yang tepat, dalam proses seleksi penerimaan siswa baru harus dapat memberikan alternatif sekolah bagi ABK yang mengalami penolakan dari sekolah karena tidaksiapan sekolah inklusi. Menyediakan sumber daya profesional seperti guru pendamping khusus yang memiliki kemampuan dalam menangani ABK. Melakukan pendampingan, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pendidikan inklusi di Kabupaten Banyumas.

2. Bagi sekolah perlu memberikan sosialisasi kepada warga sekolah tentang pendidikan inklusi dan keberadaan ABK. Mengadakan program-program penguatan budaya inklusi seperti kegiatan kolaboratif antar siswa untuk membangun empati, komunikasi dan kerja sama dalam menciptakan lingkungan yang inklusif. Tidak melakukan pengelompokan ABK dan ATBK, misalnya memasang ABK dengan ATBK agar dapat terjalin hubungan saling menghargai dan terbentuk penerimaan sosial pada ABK. Sekolah perlu membentuk tim penyusun kurikulum untuk mengembangkan kurikulum inklusif yang sesuai dengan kebutuhan siswa dan dapat mengakomodasi keberagaman siswa dalam lingkungan sekolah inklusi. Sekolah perlu memberikan ruang pada ABK untuk dapat menunjukkan potensinya baik potensi akademik maupun non-akademik, misalnya melalui pentas tahunan siswa dapat menunjukkan bakatnya. Membebaskan semua siswa untuk dapat berekspresi dan berpartisipasi dalam semua kegiatan yang dilakukan sekolah. Melibatkan ABK secara aktif dalam pengambilan keputusan kegiatan yang dilakukan dalam kelas dan sekolah.
3. Bagi masyarakat perlu mendapatkan edukasi dan sosialisasi mengenai keberadaan sekolah inklusi dan anak berkebutuhan khusus. ABK perlu untuk diakui dan memiliki hak yang sama dengan masyarakat yang lainnya. Masyarakat dapat memberikan dukungan sosial dengan tidak mengucilkan ABK, mengakui keberadaanya dengan cara tidak menganggap mereka sebagai individu yang dapat menularkan penyakit, memberikan dukungan yang terbaik pada sekolah inklusi dan juga anak-anak berkebutuhan khusus.